

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan/atau Sumber Lainnya

- Adawiyah, R. (2021). *Pemanfaatan Fitur e-Registration Selama Masa Pandemi*. Tangerang Selatan.
- Aji, Y. W. (2019). *Tinjauan atas Pendaftaran Wajib Pajak (WP) Secara Elektronik Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo*. Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan.
- Ariyanti, E. R. (2017). *Penyuluhan Hukum Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta Pusat*. Tangerang Selatan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ayusani, F. K. (2019). *Tinjauan atas Proses Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kelapa Gading*. Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan.
- Hartono, Y. B. (2021). *Tinjauan Pemanfaatan e-Registration Terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Probolinggo*. Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan.
- Machmud, M. (2019). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Research Report.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Utama, M. Y. (2020). *Maknai Momentum Pandemi, DJP Transformasi Pelayanan Pajak*. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/id/artikel/maknai-momentum-pandemi-djp-transformasi-pelayanan-pajak>

Wardani, S. I. (2019). *Tinjauan Perbandingan atas Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara Elektronik dan secara Tertulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung*. Karya Tulis Tugas Akhir. Tangerang Selatan.

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tanggal 07 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomo*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Surat Edara Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-114/PJ/2010 tanggal 5 November 2020 tentang Pedoman Standarisasi Penulisan Nama dan Alamat Wajib Pajak/Subjek Pajak/Objek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.